

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING YANG PERSISTEN DI DESA ATAWAI, KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA

Bonefasita Anjelina Pida Selo¹, Oktavianus Daluamang Payong²

^{1,2}Prodi Ilmu pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula, Ende, Indonesia

Corresponding Email: ivanboro592@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 15 Januari 2026; Disetujui: 18 Januari 2026; Diterbitkan: 21 Januari 2026

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting yang persisten di Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting yang persisten di Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab stunting masih persisten di Desa Atawai adalah masih kurangnya daya dukung dari orangtua balita terhadap penanganan stunting dan juga pendataan mengenai stunting di desa yang belum akurat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak pemerintah Desa Atawai dalam penanganan masalah stunting yang persisten.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Desa, Stunting

Abstract

This study concerns an analysis of village government policies in addressing persistent stunting in Atawai Village, Nagawutung District, Lembata Regency. The objective of this study is to analyze the policies of the village government in handling persistent stunting in Atawai Village, Nagawutung District, Lembata Regency. This research employs a qualitative research method to collect data through interviews, observations, and documentation techniques. The findings indicate that the factors contributing to the persistence of stunting in Atawai Village include insufficient parental support for stunting prevention and intervention efforts, as well as inaccurate stunting-related data at the village level. This study is expected to serve as a reference for the Atawai Village government in addressing the issue of persistent stunting.

Keywords: Policy, Village Government, Stunting

PENDAHULUAN

Stunting menjadi masalah global yang sangat serius di seluruh dunia. Menurut WHO 2005 stunting adalah keadaan pendek menurut umur yang ditandai dengan nilai indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) kurang dari -2 standar deviasi (Blossner, 2005:10;

WHO, 2005). Stunting disebabkan kekurangan gizi kronis dan inveksi berulang-ulang selama masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK) (WHA, 2012; WHO, 2014) secara luas stunting telah digunakan sebagai indikator untuk mengukur status gizi masyarakat. Apabila prevalensi balita stunting di suatu daerah tinggi maka dapat dipastikan bahwa daerah tersebut mengalami masa pembangunan secara umum, ketersediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain (Kobayashi, 2015). Dasar kebijakan percepatan penurunan prevalensi Stunting di Indonesia diatur dalam surat Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Pengurangan stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No. Pasal 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kesuburan Indonesia 2021-2024 (Payong, 2024).

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam mengatasi dan menurunkan kasus stunting, kebijakan tersebut di antaranya berupa penyediaan bahan pangan lokal untuk asupan makanan yang sehat dan bergizi, intervensi kepada remaja atau calon pengantin dengan pengecekan dan konsultasi kesehatan sebelum menikah, pemeriksaan kepada ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita terkait kondisi kesehatan ibu, anak beserta tumbuh kembang anak, membangun forum sebagai wadah edukasi dan sosialisasi tentang stunting untuk remaja (calon pengantin) dan ibu hamil, kegiatan fasilitasi Pembangunan sanitasi bagi warga negaranya (Kusumawardhani & Martianto, 2011)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Program Pencegahan dan Penanganan Stunting, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi merupakan program prioritas Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa agar pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi sebagaimana dimaksud dapat terarah, terkoordinir, terkolaborasi, terintegrasi serta melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu menetapkan Roadmap dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023.

Berdasarkan peraturan Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang peran desa dalam pencegahan dan penanganan stunting mengingat bahwa; konvergensi stunting merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai kewenangan yang dimiliki desa sehingga perlu memberikan rujukan kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung pencegahan dan penanganan stunting.

Perdes tentang Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan stunting pemerintah desa menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan stunting di tingkat lokal. Kebijakan ini diimplementasikan melalui peran kepala desa dan perangkat desa yang di mana menetapkan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk mendukung program pencegahan dan penanganan stunting, berkoordinasi dengan Puskesmas, Posyandu, dan kader kesehatan desa. Adapun pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting, yakni; pembangunan sanitasi dan air bersih untuk mencegah penyakit yang memperburuk stunting, program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi, balita, dan ibu hamil, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin untuk meningkatkan daya beli makanan bergizi, edukasi dan sosialisasi tentang gizi, pola asuh anak, dan kesehatan ibu hamil. Kebijakan lain yang dibuat adalah monitoring dan evaluasi yang di mana menggunakan eHDW (Elektronik Human Development Worker) untuk pemantauan data keluarga berisiko stunting, menyelenggarakan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk mengevaluasi capaian program, berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dalam pemantauan prevalensi stunting.

Dalam data Badan Pusat Statistik NT (2025), Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di wilayah Negara Indonesia yang juga memiliki kasus stunting yang cukup tinggi walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan angka stunting namun belum signifikan, berdasarkan data dari badan pusat statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur angka stunting pada tahun 2021 adalah 81.354 jiwa (21%), tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 77,338 jiwa (18%) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 63,804 jiwa (15%). Kasus stunting juga menjadi salah satu masalah kesehatan pada salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Lembata dengan angka stunting berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebesar 1.804 (22%), tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.398 jiwa (16%) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.045 jiwa (12%) (BPS, 2024)

Desa Atawai yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lembata, kecamatan Nagawutung yang terdiri dari 9 wilayah rukun tetangga (RT), dan 2 wilayah dusun yang memiliki kasus stunting, dengan data real sebagai berikut. Berdasarkan data real posyandu Desa Atawai tahun 2024, Desa Atawai memiliki dua unit posyandu balita yaitu posyandu mawar putih dan posyandu sisirama. Angka kasus stunting pada posyandu mawar putih dari tahun 2022 berjumlah 3 balita, tahun 2023 berjumlah 9 balita dan tahun 2024 berjumlah 4 balita, sedangkan pada posyandu sisirama angka stunting pada tahun 2022 berjumlah 1 balita, tahun 2023 berjumlah 1 balita dan tahun 2024 menjadi 7 balita. Dari data dua posyandu di Desa Atawai menunjukkan bahwa angka stunting persisten di Desa Atawai yakni pada tahun 2022 berjumlah 4 balita, tahun 2023 berjumlah 10 balita dan 2024 berjumlah 11 balita.

Untuk mengatasi angka stunting, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberi makanan tambahan siap saji yang mengandung protein seperti kacang hijau, telur, daging ayam dan susu yang dilakukan 10 (sepuluh) kali dalam satu bulan dan juga sudah dilakukan sosialisasi mengenai stunting dan pentingnya makanan bergizi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dengan tujuan dapat mengatasi angka stunting yang persisten di Desa Atawai. Dua upaya ini menjadi program penting bagi pemerintah desa dan sudah dilakukan di Desa Atawai, akan tetapi berdasarkan data real posyandu stunting masih persisten dari tahun 2022 – 2024 yakni dari angka 4 balita stunting pada tahun 2022 naik menjadi 10 balita pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 11 balita.

Berdasarkan data dan masalah di atas bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengurangi angka stunting akan tetapi sampai sekarang di desa Atawai masih mengalami masalah stunting yang persisten dari tahun 2022-2024. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Yang Persisten di Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Rachman Arif, 2024). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011:52). Dalam penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan analisis faktor penyebab stunting yang persisten di Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian analisis kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting yang persisten di Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Penelitian ini dikaji dari teori Kebijakan public menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2016) yang menggunakan empat indikator kebijakan yaitu, isi kebijakan, informasi, daya dukung dan pembagian potensi. Isi kebijakan mengkaji tentang bagaimana isi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam program-program yang dirancang, indikator informasi mengkaji mengenai bagaimana peran

sistem informasi dalam menangani masalah stunting, indikator ketiga daya dukung mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini orangtua, masyarakat, pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menangani masalah stunting sedangkan indikator keempat yaitu pembagian potensi mengkaji tentang bagaimana setiap elemen dalam masalah stunting berperan sesuai dengan isi kebijakan dalam penanganan masalah stunting.

Pada indikator pertama, isi kebijakan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah stunting di Desa Atawai sudah dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan dalam berbagai program seperti mengangkat tenaga kesehatan, menjalankan program pemberian makan tambahan bergizi, sosialisasi mengenai stunting oleh pemerintah kepada masyarakat, akan tetapi yang masih menjadi faktor penyebab stunting masih persisten adalah kurangnya daya dukung orangtua dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Indikator kedua informasi, menjelaskan mengenai Implementasi kebijakan publik yang mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Dalam konteks analisis kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting yang persisten, maka informasi menjadi salah satu faktor penghambat jika; data yang digunakan kurang akurat atau tidak diperbaharui, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih kurang, tidak ada mekanisme penyebaran informasi yang efektif dan evaluasi dan pelaporan kebijakan tidak dilakukan secara transparan. Untuk mengatasi hambatan di atas, pemerintah desa perlu, membangun sistem pencatatan dan pemantauan data yang lebih baik, menerapkan mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan berkala secara transparan. Dengan memastikan bahwa informasi tentang stunting tersedia, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak, maka kebijakan desa dalam menangani stunting yang persisten dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi kesehatan anak-anak di desa. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa dari segi informasi sudah terlaksana dengan cukup maksimal oleh pemerintah, yang masih menjadi kurang adalah implementasi oleh orangtua terhadap informasi yang diterima melalui sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan juga penanganan stunting.

Indikator ketiga dukungan, berdasarkan indikator ini pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks penanganan stunting yang persisten di desa, isi kebijakan yang tidak jelas atau tidak terperinci dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan publik antara lain kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, kurangnya dukungan dari perangkat desa, kurangnya dukungan dari tenaga kesehatan dan kader posyandu, kurangnya dukungan dari masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti terkait daya dukung seperti adanya pendampingan dari tenaga kesehatan dan pemerintah yang dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kesehatan seperti posyandu, polindes serta diadakan sosialisasi yang dapat memberikan informasi terkait penanganan stunting. Program yang diberikan pemerintah sudah cukup maksimal dan dilakukan dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi penyebab stunting yang masih persisten adalah kesadaran dan juga tingkat pemahaman orangtua terkait stunting.

Indikator keempat pembagian potensi, yang berkaitan dengan penyebab yang berkaitan dengan gagal implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Dalam konteks analisis kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting yang persisten maka, pembagian potensi menjadi salah satu faktor penghambat yaitu Pembagian potensi sumber daya manusia yang tidak merata, Pembagian potensi anggaran yang tidak optimal, Pembagian potensi infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Dalam hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh pada saat penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab masih adanya stunting masih persisten adalah pada indikator pembagian potensi dimana pendataan lengkap dan akurat belum dilakukan dengan baik atau menjadi perhatian khusus, format data hanya berupa terfokus pada kuantitas bukan pada kualitas data yang mengakibatkan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah desa hanya menjalankan sesuai dengan kebijakan yang diturunkan tanpa melihat kebijakan yang seharusnya dilakukan untuk sesuai dengan kebutuhan pencegahan dan penanganan stunting di Desa Atawai.

Teori berkaitan dengan indikator ini adalah penyebab terjadinya kegagalan kebijakan dapat dihubungkan dengan Kebijakan public menurut Van Meter dan Van Horn yang berpendapat bahwa kegagalan implementasi kebijakan karena empat factor, salah satunya adalah timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Teori ini jika dikaitkan dengan kondisi stunting Desa Atawai dapat dikatakan bahwa terkait dengan sumber daya pembantu dari kurangnya keterlibatan dan sikap pasif yang masih tinggi dari masyarakat untuk mendukung penanganan stunting berjangka panjang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dari pemerintah dan implementasinya bersama tenaga kesehatan sudah maksimal, akan

tetapi respon dari orangtua yang masih berpatokan pada keterbatasan ekonomi mereka sehingga tidak mampu menyediakan makan bergizi secara mandiri di rumah, walaupun sudah ada sosialisasi dan juga solusi dari pemerintah melalui kebijakan yang ada untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam tanaman kelor dan sebagainya yang dapat mengurangi biaya akan tetapi faktor ekonomi masih menjadi alasan bagi orangtua dalam penanganan masalah stunting.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab stunting masih persisten di Desa Atawai adalah masih kurangnya daya dukung dari orangtua balita terhadap penanganan stunting dan juga pendataan mengenai stunting di desa yang belum akurat dan kurangnya implementasi oleh orangtua terhadap informasi yang diterima melalui sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan juga penanganan stunting; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak pemerintah Desa Atawai dalam penanganan masalah stunting yang persisten.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2024). *Data Bps.Pdf* (p. 1). BPS Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ4OSMy/jumlah-balita-stunting-menurut-kabupaten-kota.html>
- Kobayashi, H. (2015). Multi-phase semicrystalline microstructures drive exciton dissociation in neat plastic semiconductors. *J. Mater. Chem. C*, 3(5), 10715–10722. <https://doi.org/10.1039/b000000x>
- Kusumawardhani, N., & Martianto, D. (2011). Kaitan Antara Prevalensi Gizi Buruk Dengan Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Kemiskinan Serta Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Gizi Buruk Pada Balita Di Berbagai Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Dan Bali. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.25182/jgp.2011.6.1.100-108>
- Payong, O. D. (2024). Governabilitas Camat Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 3508–3518.
- Rachman Arif, H. E. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Januari 2024). Jaya Publisher. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi : teori, proses, dan studi kasus komparatif/ Budi Winarno; penyunting, Tri Admojo | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.* <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=290747>

